

Pengaruh Feminisme Terhadap Kebijakan Luar Negeri Islandia (2008-2013)

Oleh :

GEBI PURNAMA SUGESTI¹

(gebyps@gmail.com)

Pembimbing: Pazli, S.IP, M.Si

Bibliografi: 4 Jurnal, 12 Buku, 14 Situs Internet dan 33 Laporan

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study will analyze the influence of feminism in Iceland's foreign policy year 2008-2013. Feminism have influenced social and political life in Iceland, especially in gender equality. Gender equality is one of the Iceland's government's key emphases and it's an important aspect of Iceland's international work on human rights.

This research will show that how external aspects can also affect in Iceland's foreign policy. Especially in increase gender equality and women's empowerment. There is five aspects that Iceland's concerns are, like politic, economy, education, health, and security. These are including support some specific projects, funds and organisations. Feminism perspective, gender concept and foreign policy decision making theory are used to discuss this research.

As for the method used in the study is qualitative research methods with explanation analysis methods. Data collection techniques are used library research techniques which utilizes secondary data obtained through library were abstracted from the literature such as books, journals, reports, documents and other materials that support this research.

Feminism has give significant influence in Iceland's foreign policy. Iceland has adopted The United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace and security through their Plan of Action and also Iceland has built Strategy for Iceland's Development Cooperation 2011-2014 according to United Nations Millenium Development Goals (MDG). Both of the strategies give strong impact for the implementations of Iceland's Foreign Policy.

Key Word: Influence, Feminism, Iceland, Foreign Policy, Gender Equality

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2010

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan feminisme di Islandia dan menganalisa pengaruh perspektif feminis terhadap kebijakan luar negeri Islandia. Republik Islandia merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki sistem multipartai, dimana kepala negaranya adalah presiden dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Secara historis dan politis, Islandia terhubung ke negara-negara Skandinavia. Meskipun berada di Eropa, namun Islandia bukan merupakan bagian dari Uni Eropa.¹ Islandia juga bagian dari negara-negara Nordik. Negara-negara Nordik selama beberapa dekade terakhir telah memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia. Kenaikan ini terjadi terutama selama 30 tahun terakhir. Pada tahun 2005, perempuan menempati lebih dari 45 persen dari anggota parlemen di Swedia, 38 persen di Finlandia, 37 persen di Denmark, 36 persen di Norwegia dan 30 persen pada pemilu di Islandia yang diselenggarakan antara 2001 dan 2005.² Menurut survey *World Economic Forum* pada tahun 2009, Islandia merupakan negara yang paling membuat kemajuan dalam menutup kesenjangan gender. WEF mengukur kemajuan dalam bidang

politik, pendidikan, ekonomi dan laporan kesehatan.³

Kiprah perempuan dalam bidang politik di Islandia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, paling tidak ada satu atau dua orang perempuan yang duduk di parlemen Islandia meskipun hal ini tidak terjadi pada setiap periode. Pada tahun 1980, Islandia untuk pertama kalinya memiliki seorang presiden perempuan, Vigdis Finnbogadóttir, yang dipilih melalui pemungutan suara. Pada tahun 2009, Islandia kembali dipimpin oleh seorang perempuan yakni Jóhanna Sigurðardóttir yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Perempuan-perempuan di Islandia juga banyak mendominasi sejumlah kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Salah satunya adalah kementerian luar negeri. Perempuan mulai mengambil tempat dalam kementerian luar negeri pada tahun 1983.⁴ Pada periode tahun 1998 - 1999, Kementerian Luar Negeri Islandia telah merekrut perempuan untuk 50 persen posisi baru yang membutuhkan gelar sarjana.⁵

Feminisme yang berkembang begitu pesat di Islandia kemudian juga berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan, baik kebijakan

¹ "The Policy In Gender Equality in Iceland", Directorate General For Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, 2010 <<http://www.europarl.europa.eu/studies>>

² Dahlerup, Drude. 1998. "Using Quotas to Increase Women's Political Representation." Azza Karam (ed.) Chapter 4. *Women in Parliament: Beyond Numbers*. <<http://www.idea.int/women/>>

³ BBC News - Iceland leads on gender equality <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8327895.stm>> (diakses 22 Oktober 2013 pukul: 13.30)

⁴ Kristjánsson, Jakob Thor and Margret Cela. 2011. "Iceland as a 'powerful' small state in the international community." Centre For Small State Studies Publication Series. University of Iceland. Working Paper 1-2011

⁵ "Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Iceland-Combined third and fourth periodic report". Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Twenty-sixth session, 14 January – 1 February 2002. Supplement No. 38 (A/57/38)

dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut sebagian besar berisikan mengenai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang.

Hal ini terlihat dengan undang-undang mengenai gender yakni *The Act on Equal Status and Equal Rights of Women and Men* (2008) atau lebih dikenal sebagai '*gender quality act*' atau undang-undang kesetaraan gender. Undang-undang mengenai kesetaraan gender di Islandia pertama kali dibuat pada tahun 1975. Undang-undang ini kemudian mengalami 4 kali revisi yaitu pada tahun 1985, 1991, 2000 dan terakhir tahun 2008. Kebijakan, praktek maupun implementasi mengenai kesetaraan gender di Islandia terlihat dari tingginya angka tenaga kerja wanita di Islandia bila dibandingkan dengan negara-negara di seluruh Eropa.¹

Tidak hanya kebijakan dalam negeri, ide-ide feminis juga berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Islandia. Pada tahun 2008, Islandia mengadopsi *National Action Plan* sebagai implementasi dari *UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security*. Pemerintah Islandia memutuskan untuk fokus pada UNSCR 1325 terutama dalam rekonstruksi pasca-konflik dan memberikan akses bagi perempuan untuk dalam negosiasi perdamaian di negara-negara konflik.² Selain itu, Departemen Luar Negeri Islandia juga gencar mempromosikan kesetaraan gender melalui PBB,

penggalangan dana, dan program-program kerja.

Meningkatnya peran dan pengaruh perempuan di Islandia telah membuat negara ini menjadi salah satu negara yang ideal bagi perempuan. Dengan banyaknya perempuan-perempuan yang menduduki parlemen dan lembaga pemerintahan di Islandia memberikan bukti bahwa feminisme telah mengalami perkembangan yang pesat di negara ini. Sejumlah kebijakan-kebijakan yang ada di Islandia sebagian besar diperuntukkan untuk kesejahteraan perempuan. Tidak hanya menyangkut kebijakan dalam negeri, tetapi juga berpengaruh dalam kebijakan luar negerinya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah.. Rumusan masalah ini berguna untuk memudahkan penulisan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaruh feminisme dalam kebijakan luar negeri di Islandia.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan feminisme di Islandia dan pengaruhnya terutama dalam kebijakan luar negeri Islandia serta implementasinya.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Landasan Teoritis

Untuk menjelaskan permasalahan diatas penulis akan menggunakan Perspektif Feminisme, Konsep Gender dan Teori Pembuatan Keputusan Kebijakan Luar Negeri. Feminisme muncul sebagai gerakan dan

¹ "The Policy In Gender Equality in Iceland", Directorate General For Internal Policies, Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, 2010 <<http://www.europarl.europa.eu/studies>>

² "Open Debate on The Security Council on Women, Peace and Security". Statement by Mr. Jón Erlingur Jónasson, Permanent Mission On Iceland to the United States, 5 October 2009

himpunan gagasan yang ditunjukkan untuk meningkatkan status dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Sejak awal lahirnya, paham feminisme memiliki jenis yang berbeda-beda berdasarkan alasan yang mereka ajukan tentang adanya ketidak setaraan, dalam cara mereka membingkai tujuan mereka, dan strategi yang mereka pilih dalam mewujudkannya.¹ Untuk mempermudah pemahaman, penulis menggunakan feminisme radikal untuk membahas feminisme di Islandia. Feminisme radikal lahir untuk mengkritik feminis liberal yang tidak mencerminkan kesetaraan gender itu sendiri. Feminis radikal menyalahkan sistem patriarki karena telah merendahkan perempuan didalam masyarakat. Istilah 'politik' didalam pemikiran mereka merujuk kepada hubungan kekuasaan-terstruktur dan pengaturan, dimana satu kelompok orang dikendalikan oleh orang lain dan ini berarti kekerasan laki-laki terhadap perempuan dipandang sebagai dasar yang penting atas kontrol laki-laki terhadap perempuan, karena negara dipandang sebagai 'alat' dominasi patriarki dan non-intervensi yang diyakini bagian dari logika sistem patriarki. Feminisme radikal menekankan akan pentingnya aksi untuk mengangkat derajat perempuan.²

Perspektif feminisme erat kaitannya dengan konsep gender. Banyak feminis kontemporer memiliki pandangan yang sama mengenai definisi dalam perbedaan gender. Secara

historis, perbedaan antara pria dan wanita biasanya dianggap berasal dari biologi. Tapi ketika kaum feminis menggunakan istilah gender, mereka umumnya tidak mengacu pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, tetapi untuk menjelaskan karakteristik budaya yang dibentuk dan didefinisikan terkait dengan maskulinitas dan feminitas.³ Titik awal memperkenalkan gender dalam hubungan internasional sering merupakan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dan akibat dari perbedaan tersebut dalam politik dunia yang mana hal ini menghasilkan posisi yang tidak mengistimewakan bagi perempuan (bias gender).

Feminisme dan konsep gender yang melekat kuat di dalam suatu negara biasanya juga sangat berpengaruh di dalam pemerintahan seperti diterapkan di beberapa kebijakan-kebijakan, salah satunya dalam kebijakan luar negeri. Dalam perkembangan dunia yang modern, perempuan telah memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Di Islandia, perempuan telah lama mengambil bagian dari kegiatan urusan luar negeri. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang menduduki sejumlah posisi di pemerintahan seperti presiden, perdana menteri dan juga menteri luar negeri. Keputusan-keputusan dalam kebijakan luar negeri, juga sebagian besar mengangkat tema gender terutama dalam membantu negara-negara lain yang masih kurang memiliki pemahaman mengenai gender.

¹ David Marsh & Gerry Stoker, *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. (Bandung: Nusa Media, 2010) hal 131-132

² Nina Katrin Johannsdottir, *Patriarchy and the subordination of women from a radical feminist point of view*, (University of Iceland, Mei 2009)

³ J. Ann Tickner, *Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security*, Columbia University Press, 1992.

Hasil dan Pembahasan

Feminisme bukanlah sebuah istilah baru di Islandia. Selama beberapa tahun terakhir Islandia telah mendapat sorotan dunia karena keberhasilannya dalam program kesetaraan gender. Islandia juga telah mendapat peringkat sebagai pemimpin dunia dalam kesejahteraan gender selama bertahun-tahun. Islandia sering disebut sebagai negara model dalam hal pemberdayaan politik perempuan dan sebagai negara yang menghargai perempuan terutama dalam memberikan dukungan dan inspirasi baik dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Selama 5 tahun terakhir, Islandia telah menduduki peringkat teratas di *Global Gender Gap Index*. Hal ini diraih berdasarkan hasil yang baik dalam hal pemberdayaan politik dan pencapaian pendidikan dan peningkatan partisipasi ekonomi perempuan sejak tahun 2011.

Perkembangan Feminisme Di Islandia

Asosiasi perempuan pertama di Islandia didirikan pada tahun 1869 di sebuah daerah kecil di bagian utara Islandia (*Kvenfélag Ripurhrepps*). Deklarasi asosiasi menyatakan bahwa anggota ingin memperkuat semangat kerjasama di antara perempuan di daerah ini. Pada tahun 1894, berdiri asosiasi politik perempuan pertama di Islandia, yakni *The Icelandic Women's Organization*. Tugas pertama organisasi ini adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam rangka membangun sebuah universitas di Islandia. Organisasi ini kemudian memimpin yang dalam hal ini dapat disebut sebagai perbedaan partisipasi politik perempuan dari satu protopolitik. Di tahun ini berdiri juga *The Icelandic Women's Right Association*, dimana

pada awalnya fokus utama dari asosiasi ini adalah mengenai hak pilih perempuan. Pada tahun 1915, perempuan yang berusia diatas 40 tahun diberikan hak pilih dan nasional hak untuk memperoleh jabatan.

Pada tahun 1917, organisasi perempuan di Reykjavik membentuk asosiasi mereka sendiri (*Bandalag kvenna*). Terdapat total 11 organisasi perempuan pada masa itu, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat *philantropic* yang berusaha untuk mengurangi masalah akibat pertumbuhan kota dan kemajuan industri tetapi tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial.¹

Pada pemilihan dewan kota pada tahun 1922, partai-partai politik menolak untuk menempatkan perempuan dalam kursi yang aman. Hal ini membuat para perempuan sangat marah dan mereka memutuskan untuk memasukkan kandidat perempuan dalam pemilihan parlemen akhir tahun.²

Pada tahun 1983 berdiri berdiri organisasi yang mencakup keseluruhan partai politik perempuan di Islandia yaitu *The Women's Alliance (Krennalistin)*. Tujuannya adalah untuk memajukan kesetaraan perempuan dan untuk meningkatkan jumlah perempuan di Parlemen Islandia.³ Ketika awal pembentukan *The Woman's Alliance*,

¹ Styrkârsdottir, Auður.1988. *The Rise and Decline of Women's Politics in Reykjavik 1908-1922*. Sweden : Department of Political Science Umeå University.

² Women's suffrage in Iceland <<http://kvennasogusafn.is/index.php?page=womens-suffrage>> (Diakses pada 5 Agustus 2014)

³ Dialogue on Democracy: Where are the women?. Famous 5 Foundation & Sheldon Chumir Foundation for Ethics in Leadership. 9 February 2008. <<http://www.chumirethicsfoundation.ca/files/pdf/HANDOUT%20-%20AllWoman%27sParty020908.pdf>>

perempuan hanya 5% dari anggota parlemen tetapi setelah pemilihan pertama dimana organisasi bergabung, jumlah ini meningkat menjadi 15%.

Sepanjang tahun 1990-an kemajuan terus terjadi di berbagai bidang. Penelitian dan kemajuan akademik mengenai isu gender meningkat, terutama setelah berdirinya *Centre for Women's and Gender's Studies* pada tahun 1990 dan pembentukan *Gender Studies* pada tahun 1996 di Universitas Islandia. Pada tahun 1991, Kementerian Urusan Sosial membentuk sebuah komite tentang peran laki-laki dalam isu kesetaraan gender. Pada tahun 1995, sebuah pasal baru ditambahkan ke dalam Konstitusi yang mengartikulasikan bahwa perempuan dan laki-laki harus sama dalam segala hal. Pada tahun 1996, pasangan sesama jenis diberikan hak untuk mendaftarkan hubungan mereka. Perempuan menduduki seperempat dari semua kursi parlemen pada tahun 1995, dan pada tahun 1999 mereka memperoleh 35% kursi dari semua anggota parlemen.

Untuk menghadapi sikap stagnan masyarakat mengenai isu-isu kesetaraan gender, *Feminist Association of Iceland* didirikan pada tahun 2003 dan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu gender. Pada tahun yang sama kelompok laki-laki dari asosiasi tersebut menyelenggarakan kampanye terhadap keterlibatan laki-laki dalam perjuangan untuk menghentikan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Selama masa ini, banyak perempuan yang menjadi pelopor dan pemimpin di berbagai sektor, diantaranya : presiden universitas pertama, presiden asosiasi pemuda nasional, presiden asosiasi olahraga nasional dan presiden bank pertama.

Pada periode 2000 hingga 2010, terdapat beberapa pembangunan penting diantaranya : gay dan lesbian diberikan hak penuh, undang-undang yang melarang prostitusi, undang-undang pelarangan klub-klub penari striptis, dan hukum yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki rasio minimum 40:60 bagi perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2009, Johanna Sigurdardottir menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Islandia dan selama beberapa bulan perempuan dan laki-laki memiliki jumlah yang sama dalam menteri kabinet. Setelah pemilihan parlemen pada tahun 2009, perempuan memperoleh 40% suara sedangkan laki-laki memperoleh 60%. Pada pemilihan ini perempuan juga mencapai persentase tertinggi dari 33% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2009. Pada tahun 2010, perempuan juga mencapai angka 40% untuk pertama kalinya di dewan lokal. Persentase tertinggi perempuan adalah 45%.¹

Gender Mainstreaming Dalam Kebijakan Luar Negeri Islandia

Kesetaraan gender merupakan tema lintas sektoral yang berarti bahwa semua proyek pembangunan dan upaya kerjasama berkaitan dengan kesetaraan gender. Dampak dari tindakan ini adalah untuk menganalisa dan berupaya untuk melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan dan implementasi kebijakan. Pengarusutamaan kesetaraan gender adalah proses jangka panjang diarahkan pada administrasi dan

¹ "Gender Equality In Iceland. Information on Gender Equality Issues in Iceland." Centre for Gender Equality Iceland. February 2012. Diakses dalam bentuk pdf dari < www.althingi.is/pdf/wip/Gender_Equality_in_Iceland_2012.pdf>

pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sejumlah besar perempuan di negara berkembang mengalami ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Atas alasan inilah, Islandia mendukung proyek-proyek tertentu, mendanai dan terlibat dalam organisasi yang tujuan utamanya adalah mempromosikan dan meningkatkan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan.¹

Dalam kebijakan luar negerinya, Pemerintah Islandia menekankan kerjasama dengan negara-negara Nordik, Uni Eropa, isu Kutub Utara dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam. Selain itu, penekanan ditempatkan pada kerjasama internasional dalam kerangka PBB. Penekanan ditempatkan pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan keamanan antara lain dengan memerangi kemiskinan, ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan dan kelaparan. Pengembangan kerjasama Islandia didasarkan pada Tujuan Pembangunan Milenium PBB (*United Nations Millenium Development Goal*) dengan penekanan khusus pada bidang-bidang yang dianggap memiliki keunggulan komparatif, seperti perikanan, pemanfaatan energi panas bumi dan kesetaraan gender. Selain itu, memajukan tujuan UNSCR 1325 dan resolusi terkait pada perempuan, perdamaian dan keamanan merupakan prioritas.

Mempromosikan kesetaraan gender merupakan prioritas utama

Islandia dalam kerjasama pembangunan dan juga sebuah tujuan khusus dari Resolusi Parlemen dalam Strategi Pengembangan Kerjasama Internasional Islandia tahun 2013-2016. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia dan kesetaraan sesungguhnya adalah salah satu prinsip inti dari konsep hak asasi manusia.²

Visi kesetaraan gender Islandia dalam kerjasama pembangunan juga didasarkan pada asumsi bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat bagi kemajuan dan pembangunan. Kesetaraan gender tidak hanya penting dalam pembangunan tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi. Dengan kata lain, kesetaraan gender merupakan kebijakan ekonomi yang bijak. Penelitian telah menunjukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meningkatkan produktivitas dalam masyarakat; menguatkan lembaga-lembaga dan meningkatkan prospek generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi dan tingginya pendapatan mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini lebih menyatakan bahwa ekonomi dan lembaga-lembaga masyarakat baik formal maupun informal, makmur dan kuat/stabil. Ini juga mempengaruhi keputusan baik yang diambil secara basis komunitas maupun rumah dan memperkuat posisi perempuan dan mengurangi diskriminasi gender yang berkaitan dengan pendidikan laki-laki dan perempuan dan partisipasi

¹ "Gender Equality In Iceland's International Development Co-operation". Ministry for Foreign Affairs and Icelandic International Development Agency" 2013. Diakses dalam bentuk pdf dari <www.mfa.is/media/throunarsamvinna/UTR-GenderEquality-2013.pdf>

² "Gender Equality In Iceland. Information on Gender Equality Issues in Iceland." Centre for Gender Equality Iceland. February 2012. (Diakses dalam bentuk pdf dari <www.althingi.is/pdf/wip/Gender_Equality_in_Iceland_2012.pdf>

perempuan dalam politik dan pasar tenaga kerja.¹

Strategi dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri Islandia Terhadap Kesetaraan Gender Kesejahteraan Perempuan

Dalam pembentukan strategi kebijakan luar negeri yang berbasis gender, Islandia telah mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB (*The United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace and security*). Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik secara damai. Hal ini juga mempertegas kesetaraan perempuan terhadap partisipasi dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian dan keamanan. Kebijakan pemerintah Islandia ini dituangkan dalam *Iceland's Plan of Action for the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 (2000)*.

Rencana Aksi Nasional Islandia (*Iceland's Plan of Action*) terhadap implemetasi Resolusi Dewan Keamanan PBB dikembangkan pada tahun 2008, ditetapkan bahwa rencana harus ditinjau tiga tahun setelah berlakunya dan diperbarui dengan mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan.

Selain rencana aksi nasional, dalam kebijakan luar negerinya, Islandia juga membentuk *Strategy for Iceland's Development Cooperation 2011-2014* yang diadopsi dari Althingi pada 10 Juni 2011. Strategi ini berdasarkan UU no. 121/2008 dalam *Iceland's International Development Cooperation*. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk mengambil pendekatan holistik terhadap

kebijakan pembangunan Islandia. Oleh karena itu, strategi ini mencakup kerjasama multilateral dan bilateral, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian.

Strategi ini mengidentifikasi kerjasama pembangunan internasional sebagai salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Islandia. Prinsip-prinsip panduan terhadap kerjasam pembangunan adalah tanggung jawab, kredibilitas dan hasil kebijakan pembangunan Islandia berakar pada hak-hak dasar semua orang sebagaimana tercantum Piagam PBB, yang menekankan toleransi, keadilan, solidaritas dan keragaman budaya. Stategi ini dibentuk pada *Millennium Development Goals (MDG)* dengan fokus memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta menyoroti hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, perdamaian dan keamanan.

Tujuan utama dari usaha Islandia terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam kerjasama pembangunan 2011-2014 adalah: pengarusutamaan gender dalam semua proyek pembangunan; mempromosikan pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB tentang perempuan, perdamaian dan keamanan; melaksanakan Rencana Aksi Islandia pada UN SCR1325; menerapkan anggaran gender, dan meningkatkan bobot gender dalam pembuatan kebijakan dan proyek yang dilaksanakan oleh organisasi internasional. Hal ini termasuk pembentukan kelompok kerja dalam kesetaraan gender oleh kementerian luar negeri dan ICEIDA, persiapan kerjasama pengembangan kebijakan mengenai gender bersama dan meninjau Rencana Aksi mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan. Kelompok kerja telah ditetapkan,

¹ "Gender Equality In Iceland's International Development Co-operation", op.cit

Rencana Aksi telah ditinjau dan Rencana Aksi kedua sedang dipersiapkan.

Dalam implementasinya, pemerintah Islandia memfokuskan pada 5 bidang, yaitu: politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

a. Politik

Kesetaraan gender merupakan salah kunci penekanan utama pemerintah dan tindakan untuk meningkatkan hak-hak perempuan merupakan aspek penting dalam rencana kerja internasional Islandia pada kerangka hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir peningkatan terhadap penekanan ini telah ditempatkan dalam kebijakan luar negeri Islandia mengenai hak asasi manusia.

Salah satu kampanye terbesar Islandia adalah memberikan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam negosiasi iklim internasional. Islandia telah membuat keputusan politik untuk memprioritaskan isu-isu gender dalam negosiasi iklim internasional. Ada beberapa alasan terkait dengan keputusan Islandia tersebut. Pertama, prinsip persamaan hak dan inklusi, dan pemberdayaan perempuan dalam semua aspek pengambilan keputusan. Kedua, fakta bahwa perubahan iklim mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda karena faktor sosial, ekonomi dan lainnya. Ketiga, pragmatisme sederhana untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam memecahkan masalah ini mungkin merupakan hal yang paling mendesak yang dihadapi umat manusia.

Dari beberapa alasan inilah yang menyebabkan Islandia menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan gender ke dalam semua aspek utama dari negosiasi iklim. Hal itu diakui dalam perjanjian Cancun

bahwa partisipasi perempuan sangat penting dalam pengambilan tindakan yang efektif terhadap perubahan iklim.¹ Konsekuensi dari perubahan iklim tidak sama bagi perempuan dan laki-laki. Pengalaman, pengetahuan dan keahlian khusus perempuan dengan rekan laki-laki mereka. Meskipun jejak ekologi perempuan umumnya lebih kecil dari laki-laki, konsekuensi yang sulit akibat perubahan iklim berdampak pada kegiatan ekonomi perempuan, tidak kurang dari laki-laki, selain itu pekerjaan rumah tangga mereka dan perjuangan sehari-hari untuk mencari nafkah menjadi semakin sulit. Efek perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan bangsa.²

b. Ekonomi

Komite Nasional Islandia untuk UNIFEM memberikan bantuan sebesar US\$ 1,4 juta pada 8 Maret 2008, setelah berkampanye selama seminggu untuk mengumpulkan dana bagi UN Trust Fund untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang dikelola oleh UNIFEM. Kontribusi Islandia akan memungkinkan UN Trust Fund untuk mendanai proyek untuk melawan kekerasan terhadap perempuan di Liberia, Republik Demokratik Kongo dan Sudan.

Pada tahun 2011, untuk pertama kalinya Islandia melakukan penerapan pedoman umum yang diperkenalkan oleh Kementerian Luar Negeri dan ICEIDA. Untuk mengalokasikan hibah

¹ Minister for the Environment Svavarsdóttir: Gender considerations into all aspects of climate negotiations. Dikutip dari

<http://www.equalclimate.org/en/whats_being_done+/iceland/> (Pada 19 Agustus 2014)

² "Gender Equality In Iceland's International Development Co-operation"., op.cit

kepada organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam upaya bantuan internasional. Pada tahun ini, ada 2 hibah yang dialokasi, dengan total ISK 104 juta. Menurut Strategi Kerjasama Pembangunan Islandia 2011-2014, akan ada anggaran khusus yang akan dikontribusikan kepada NGO pada tahun 2012 dan diharapkan permohonan hibah untuk proyek-proyek dalam kerja sama pembangunan juga akan diterima.

c. Pendidikan

Hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan adalah hal mendasar dalam hak asasi manusia. Pendidikan merupakan cara efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan, sekaligus mengurangi ketidakadilan. Untuk itu penekanan terhadap pendidikan bagi kaum perempuan adalah hal yang sangat penting. Pendidikan memberikan akses pengetahuan kepada mereka, memungkinkan mereka untuk meningkatkan standar hidup dan juga memfasilitasi mereka ke dalam lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga pengambilan keputusan formal. Pendidikan yang diberikan kepada kaum perempuan memiliki efek ganda. Perempuan yang berpendidikan lebih cenderung untuk tidak menikah muda dan memiliki anak lebih sedikit, yang pada akhirnya lebih bertahan hidup dan lebih sehat. Selain itu, perempuan berpendidikan lebih siap untuk melindungi hak-hak mereka dan lebih berpengaruh terhadap lingkungan mereka.

Sasaran pemerintah Islandia adalah mempromosikan pendidikan bagi anak laki-laki dan perempuan dan menyediakan kesempatan belajar membaca dan menulis untuk

memberantas buta huruf. Untuk tujuan ini, Islandia berkontribusi melalui proyek-proyek dibawah arahan organisasi internasional.¹

Salah satu bentuk kepedulian Islandia terhadap pendidikan adalah dengan membentuk *The Gender Equality Studies and Training Programme (GEST Programme)*. *GEST Programme* merupakan proyek kerjasama pembangunan internasional antara University of Iceland dan Kementerian Luar Negeri Islandia. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan. Program ini mengajak para laki-laki dan perempuan dari negara berkembang maupun negara konflik/ pasca konflik untuk mengikuti kursus pelatihan 3-6 bulan secara intensif mengenai ide-ide, kebijakan dan praktek mengenai kesetaraan gender. Ini juga merupakan tempat untuk melakukan dialog transnasional dan interaksi antara peserta dari berbagai belahan dunia. Program ini menawarkan ide-ide dan kebijakan kesetaraan gender Nordik dan memberikan para guru serta pengamat kesempatan mengekspos karya mereka untuk diawasi secara kritis.

d. Kesehatan

Kurangnya pelayanan kesehatan dan buruknya fasilitas kesehatan merupakan masalah utama yang dihadapi di daerah berkembang. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan yang buruk tidak dapat berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat. Alasannya adalah sebagian besar dari mereka

¹ "Gender Equality In Iceland's International Development Co-operation". op.cit.

menghabiskan banyak waktu merawat anggota keluarga yang sakit.¹

Dalam berbagai masyarakat, perempuan terkenal sebagai pengguna layanan kesehatan dan juga sebagai perawat, baik di rumah maupun di lembaga-lembaga kesehatan. Pelayanan kesehatan yang tersedia untuk perempuan, umumnya hanya terkait dengan peran mereka dalam melahirkan dan merawat bayi tetapi hal ini terbatas untuk menjalankan peran perempuan itu saja, tidak untuk kesehatan pribadi mereka. Penelitian medis seringkali mengenyampingkan perbedaan gender dalam kaitannya dengan penyebab dan pengobatan penyakit, serta telah mengabaikan masalah kesehatan perempuan yang lebih spesifik.

Tingginya angka kematian ibu di banyak negara miskin di dunia, mengindikasikan kekurangan yang serius dalam pelayanan kesehatan yang tersedia bagi perempuan dan kondisi-kondisi tersebut berkaitan dengan posisi sosial spesifik gender dalam masyarakat. Status spesifik gender juga berpengaruh pada akses terhadap layanan kesehatan. Status sosial dan ekonomi perempuan yang lebih rendah, beban kerja yang dimiliki perempuan dan pembatasan ruang gerak memiliki efek di banyak tempat, menghalangi mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Solusi dari perawatan masalah kesehatan harus mencerminkan kenyataan ini.

Untuk mengatasi hal ini, *Icelandic International Development*

Agency (ICEIDA) berniat untuk mengintegrasikan gender dan perspektif kesetaraan gender ke dalam proyek pengembangan dalam sektor kesehatan. Integrasi ini didasarkan pada dua poin utama yaitu : memahami efek yang dimiliki oleh diskriminasi spesifik gender dan ketidakseimbangan kekuatan dalam bidang kesehatan dan akses ke dalam pelayanan kesehatan; dan menargetkan kebutuhan spesifik gender perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang dibentuk baik oleh peran biologis mereka dan posisi sosial dan ekonomi mereka.

Salah satu peran ICEIDA dalam meningkatkan kesejahteraan kesehatan adalah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan publik di Malawi khususnya di Distrik Mangochi melalui *The Public Health Programme* yang merupakan bagian dari *Mangochi Basic Services Programme (MBSP)* yang akan diimplementasikan oleh *Mangochi District Council* dan di danai oleh ICEIDA. Periode program ini adalah 4 tahun dari Juli 2012 hingga Juni 2016. Fokus utamanya adalah terhadap kesehatan ibu dan anak khususnya dalam mengurangi angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu.²

Melalui penekanan terhadap masalah kesehatan ibu, program ini berusaha untuk mengatasi salah satu masalah utama perempuan di Malawi yang pada saat yang sama merupakan salah satu penyebab kesenjangan gender di negara ini. Semua upaya ICEIDA di

¹ "Iceland's Policy on Development Co-operation 2005 – 2009." Ministry for Foreign Affairs. September 2005. (Diakses dalam bentuk pdf melalui <www.iceida.is/media/pdf/ThSSI_arsskyrsla2009.pdf>)

² "Mangochi ICEIDA Partnership in Public Health. Part II of the Mangochi Basic Services Programme (MBSP)." ICEIDA Programme Document 2012 – 2016. Diakses dalam bentuk pdf dari <<http://www.iceida.is/media/verkefnagagnabanki/Mangochi-ICEIDA-Partnership-in-Public-Health-2012-2016-Part-II-MBSP---MAL12220-1204.pdf>>

Malawi selaras dengan tujuan *Millenium Development Goals* yang mana program ini secara spesifik paling menguntungkan perempuan pada usia subur. Dengan demikian, ICEIDA memberikan masukan yang kuat dalam memperbaiki kondisi rentan yang mengancam jiwa perempuan usia subur dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya.¹

e. Keamanan

Salah satu prioritas utama kebijakan Pemerintah Islandia adalah mempromosikan perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai. Partisipasi Islandia dalam misi perdamaian dan rekonstruksi merupakan kontribusi penting yang dilakukan oleh salah satu negara anggota PBB tanpa angkatan bersenjata dan satu-satunya negara anggota NATO tanpa militer. Islandia menginginkan negaranya menjadi penasihat perdamaian aktif dalam komunitas internasional. Pemerintah Islandia secara khusus memberikan perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dalam negosiasi perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik.

Dalam upayanya tersebut, Islandia kemudian membentuk *Iceland Crisis Response Unit (ICRU)*. ICRU merupakan sebuah organisasi penjaga perdamaian sipil yang memiliki kekuatan dan karakteristik yang berbeda. Beragam keahlian terutama pengetahuan dan pelatihan khusus telah ditunjukkan di daerah yang dilanda

perang. ICRU telah berpartisipasi dalam berbagai misi dan mensuplai personil untuk mengisi beberapa posisi. Dalam beberapa tahun terakhir, ICRU telah mengirim sejumlah perempuan ke lapangan.²

Sebagai bagian dari kontribusi Islandia terhadap UNIFEM, ICRU selama bertahun-tahun telah menakhodai posisi kesetaraan gender untuk proyek khusus UNIFEM di Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang difokuskan terhadap negara-negara Balkan. Proyek ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pembangunan perdamaian di wilayah tersebut, memperkuat pemerintahan yang demokratis dan mendorong aspek kesetaraan yang lebih besar dalam pemerintahan dan infrastruktur. Pada tahun 2009, Islandia melakukan perluasan kerjasama dengan menjadi penasihat gender di Republik Serbia. Hal ini merupakan bagian dari perjanjian antara UNIFEM dan Kementerian Luar Negeri Islandia untuk mendukung kesetaraan gender dan memperbaiki situasi perempuan di seluruh dunia. Selain itu Islandia juga telah membiayai dan mengisi posisi Pegawai Profesional Junior untuk UNIFEM di Liberia.

Dalam pelaksanaannya, ICRU juga menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325. Resolusi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kepentingan perempuan secara khusus selama dan setelah konflik untuk mensukseskan upaya pembangunan perdamaian. Sesuai dengan resolusi tersebut, pemerintah

¹ ICEIDA - Annual Report 2011 - Icelandic bilateral development cooperation from January 1 to Desember 31, 2011. (Diakses dalam bentuk pdf dari <iceida.eplica.is/media/arsskyrsla/iceida_annual_report.pdf>)

² "Iceland Crisis Response Unit. Annual Report 2007." Ministry for Foreign Affairs. 2008. (Diakses dalam bentuk pdf dari <www.mfa.is/media/fridargaeslan/Arsskyrsla_IF_2007_enska.pdf>)

Islandia telah mengadopsi sebuah rencana aksi untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan kerangka kerja. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana aksi tersebut, semua personil ICRU dikerahkan dan dilatih dalam mengenali kebutuhan khusus perempuan di daerah konflik dan pentingnya kesetaraan. Selain itu, partisipasi perempuan di ICRU telah mengalami peningkatan dan sekitar 45% dari mereka tersebar dalam berbagai misi.¹

Simpulan

Selama beberapa tahun terakhir Islandia memiliki representasi politik perempuan tertinggi di dunia. Islandia seperti negara-negara Nordik lainnya memiliki persentase perempuan yang tinggi dalam parlemen. Perkembangan feminisme yang begitu pesat di Islandia sangat berpengaruh terhadap sejumlah kebijakan-kebijakan-kebijakan. Pada tahun 1975, Islandia membuat undang-undang kesetaraan gender yaitu *The Act on Equal Status and Equal Rights of Women and Men*. Undang-undang ini kemudian mengalami 4 kali amandemen yaitu pada tahun 1985, 1991, 2000 dan terakhir pada tahun 2008.

Tidak hanya kebijakan dalam negeri, feminisme juga berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Islandia. Pada tahun 2008, Islandia mengadopsi *National Action Plan* sebagai implementasi dari *UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security*. Resolusi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik secara damai. Pemerintah Islandia memutuskan untuk fokus terhadap rekonstruksi pasca konflik dan akses bagi perempuan untuk

terlibat dalam negosiasi perdamaian di negara-negara konflik.

Selain itu Islandia juga membentuk strategi melalui kerjasama pembangunan Islandia (*Iceland's International Development Cooperation*) yang fokus memerangi kemiskinan dan kelaparan, serta menyoroti hak asasi manusia, kesetaraan gender, demokrasi, perdamaian dan keamanan. Strategi ini mencakup kerjasama multilateral dan bilateral, bantuan kemanusiaan dan upaya perdamaian.

Dalam implementasi strategi-strategi tersebut, Islandia memfokuskan terhadap 5 bidang utama yaitu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Hal ini termasuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut terlibat dalam negosiasi dan pembuatan kebijakan terkait dengan perubahan iklim, mendanai proyek untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, membentuk *The Gender Equality Studies and Training Programme (GEST Programme)*, bekerjasama dengan *Icelandic International Development Agency (ICEIDA)* dalam peningkatan kesehatan publik di Malawi dan terakhir membentuk *Iceland Crisis Response Unit (ICRU)* yang selama bertahun-tahun telah berkontribusi besar terhadap kesetaraan gender untuk proyek khusus UNIFEM di Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang difokuskan terhadap negara-negara Balkan.

Daftar Pustaka

Buku:

Fer, Drude Von Der, Bente Rosenbeck
& Anna

¹“Iceland In Brief. Women, Peace and Security.” Ministry for Foreign Affairs. February 2009.

- G.Jónasdóttir.1998. "Is there a Nordic feminism? Nordic feminist thought on culture and society".London: UCL Press Limited
- Viotti, Paul. R & Mark V. Kauppi. 1990." *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*". USA: Allyn and Bacon
- Marsh, David & Gerry Stoker. 2010. "Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa Media
- Asrudin & Mirza Jaka Suryana. 2009. Refleksi Teori Hubungan Internasional: Dari Tradisional ke Kontemporer". Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mintz, Alex and Karl DeRouen Jr.2010. "Understanding Foreign Policy Decision Making". New York : Cambridge University Press
- Sitepu, P. Anthonius.2011. "Studi Hubungan Internasional".Yogyakarta: Graha Ilmu
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009." *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jackson, Robert & George Sorensen. 2005. "Pengantar Studi Hubungan Internasional". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mas'oed, Mochtar. 1990. "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi-Edisi Revisi". Jakarta: LP3ES
- Rosenau, James N Gavin Boyd & Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics : An Introduction*. New York: The Free Press
- Tong, Rosemarie Putnam.1989." *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*". USA : Westview Press.
- Tickner, J. Ann. 1992. *Gender in International Relations: Feminist Perspectives in Achieving Global Security*. Columbia University Press.
- Jurnal:**
- Jónsson, Guðmundur. 2001. 'The Icelandic Welfare State in the Twentieth Century', *Scandinavian Journal of History* 26
- Mundy, Dean E. 2013. "Framing Saint Johanna: Media Coverage of Iceland's First Female (and the World's First Openly Gay) Prime Minister," *Journal of Interdisciplinary Feminist Thought*: Vol. 7: Iss. 1, Article 5.
- Rose, Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy". *World Politics*, Vol. 51, No. 1 (Oct, 1998)
- Ruiz, Tricia.2010." *Feminist Theory and International Relations: The Feminist Challenge to Realism and Liberalism*". <www.csustan.edu/honors/documents/journals/soundings/Ruiz.pdf>

Dokumen dan Laporan :

- “Concluding comments of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Iceland-Combined third and fourth periodic report”. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Twenty-sixth session, 14 January – 1 February 2002. Supplement No. 38 (A/57/38)
- “Gender Equality in Iceland’s International Development Co-operation”. Icelandic International Development Agency, Ministry for Foreign Affairs 2013
- Iceland Crisis Response Unit (ICRU) In Brief*. Iceland Ministry For foreign Affairs, February 2009
- Althing, 2004. The Secretariat of Althingi.
<http://www.althingi.is/pdf/enska.pdf>
- Local Governments in Iceland*. The Association of Local Authorities in Iceland, Ministry of Social Affairs and Statistics Iceland. <
<http://www.samband.is/media/enska/SIS-enska.pdf>>
- Baldur, Thorhallsson.2013.” *Iceland’s contested European Policy: The Footprint of the Past A Small and Insular Society.*” Jean Monnet Occasional Papers No. 1, Institute for European Studies (Malta) <
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0007/198529/JMBaldurPaper022013webv6.pdf>
- Björnsson, Ellert Jón & Kristinn Thor Valtýsson. *Financial Crisis in Iceland . Icelandic Monetary Policy*. Aarhus School of Business. Desember 2009.
<pure.au.dk/portal/files/8701/KTV_EJB_monpolicy.pdf>
- Gender Equality in Iceland. Information on Gender Equality Issues in Iceland*. Centre for Gender Equality Iceland. February 2012.
<eng.fjarmalaraduneyti.is/media/Gender_Equality_in_Iceland_012012.pdf>
- Gender Equality In Iceland. Information on Gender Equality Issues in Iceland*. Centre for Gender Equality Iceland. February 2012.
<www.althingi.is/pdf/wip/Gender_Equality_in_Iceland_2012.pdf>
- Gender Equality In Iceland*. Center For Gender Equality. Iceland’s Ministry Of Social Affairs. <
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Jafnrettisstofa_Stepping_Stones.pdf>
- Women and Men in Iceland 2014*. Statistic Iceland. <
www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14943>
- Gender Equality In Iceland’s International Development Co-operation .* Ministry for Foreign Affairs and Icelandic International Development Agency” 2013.
<www.mfa.is/media/throunarsamvinna/UTR-GenderEquality-2013.pdf>

- Women, Peace and Security: Iceland's Plan of Action for the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325* (2000). Ministry for Foreign Affairs. 8 Maret 2008
- Women, Peace and Security. Iceland's National Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security* 2013–2016. Ministry for Foreign Affairs. 2013 <www.mfa.is/media/fridargaeslan/UT-WomenPeaceSecurity-2013.pdf>
- The GEST Programme Introduction.* University of Iceland. <https://gest.hi.is/wp-content/uploads/2012/01/GEST-Introduction_gest.hi.is.pdf>
- Iceland International Development Cooperation. Overview of Iceland's Development Cooperation 2009 and 2010.* Ministry for Foreign Affairs. 2011
- Iceland's Policy on Development Cooperation 2005 – 2009.* Ministry for Foreign Affairs. September 2005. <www.iceida.is/media/pdf/ThSSI_arsskyrsla2009.pdf>
- Mangochi ICEIDA Partnership in Public Health. Part II of the Mangochi Basic Services Programme (MBSP). ICEIDA Programme Document 2012 – 2016.* <<http://www.iceida.is/media/verkefnagagnabanki/Mangochi-ICEIDA-Partnership-in-Public-Health-2012-2016-Part-II-MBSP---MAL12220-1204.pdf>>
- ICEIDA - Annual Report 2011 - Icelandic bilateral development cooperation from January 1 to Desember 31, 2011.* <iceida.eplica.is/media/arskyrsla/iceida_annual_report.pdf>
- Iceland Crisis Response Unit. Annual Report 2007.* Ministry for Foreign Affairs. 2008. (Diakses dalam bentuk pdf dari <www.mfa.is/media/fridargaeslan/Arsskyrsla_IF_2007_enska.pdf>)
- Iceland In Brief. Women, Peace and Security.* Ministry for Foreign Affairs. February 2009.
- Website :**
 AlthingIceland <http://www.iceland-vacation-information.com/althing_iceland.html> (diakses tanggal 22 Oktober 2013 pukul 00.45)
 <<http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.html>> (diakses pada 20 November 2013)
 <<http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>> (diakses pada 19 November 2013)
 BBC News - Iceland leads on gender equality <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8327895.stm>> (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul: 13.30)

IAT-SIA <<http://www.iat-sia.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=87&cntnt01returnid=21>> (diakses pada 17 Agustus 2014 Pukul 22.14)

Division of Powers, European Union. <<http://extranet.cor.europa.eu/divisionpowers/countries/Candidates/Iceland/Pages/default.aspx>> (diakses pada 15 Agustus 2014 Pukul 21.53)

Iceland: Government. <<http://globaledge.msu.edu/countries/iceland/government>> (diakses 15 Agustus 2015)

Iceland Economy. <http://www.economywatch.com/world_economy/iceland> (Diakses pada 17 Agustus 2014 Pukul 21.07)

Iceland: Government. <<http://globaledge.msu.edu/countries/iceland/government>> (diakses pada 15 Agustus 2014 Pukul 23.09)

Statistic Iceland, <<http://www.statis.is/>> (diakses pada 20 Agustus 2014 Pukul 14.30)

Women's suffrage in Iceland <<http://kvennasogusafn.is/index.php?page=womens-suffrage>> (Diakses pada 5 Agustus 2014)

Minister for the Environment Svavarsdóttir: Gender considerations into all aspects of climate negotiations. Dikutip dari <http://www.equalclimate.org/en/whats_being_done+/iceland/> (Pada 19 Agustus 2014)

Icelandic National Committee for UNFEM donates US\$ 1.4 million to UN Trust Fund to END Violence against Women. Dikutip dari <<http://reliefweb.int/report/liberia/icelandic-national-committee-unfem-donates-us14-million-un-trust-fund-end-violence>> (Diakses pada 19 Agustus 22.10)